



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2898-2908

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Partisipasi Kelas Menengah Dalam Pilkada Wali Kota Di Kelurahan Padebuolo Kota Gorontalo

Iskawatai Laginta¹, Rauf A. Hatu², Dewinta Rizky R. Hatu³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Sosiologi

¹lagintaiskawati@gmail.com, ²rauffhatu@ung.ac.id, ³dewinta@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi politik kelas menengah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Gorontalo dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi rasionalitas dalam menentukan pilihan politik. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengandalkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Informan penelitian dipilih dari kelompok kelas menengah yang memiliki latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, serta keterlibatan sosial yang relatif baik, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pola partisipasi politik mereka serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam dinamika politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik kelas menengah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh tingkat pendidikan, status sosial, serta kekuatan jaringan sosial yang mereka miliki. Dalam menentukan pilihan politik, kelompok ini cenderung mempertimbangkan visi dan misi kandidat, rekam jejak, integritas personal, serta manfaat rasional yang dapat diperoleh, sesuai dengan kerangka teori pilihan rasional. Selain itu, jaringan sosial seperti organisasi keagamaan, komunitas profesional, lingkungan pertemanan, dan ruang diskusi informal turut memberikan pengaruh signifikan dalam membentuk orientasi politik mereka, termasuk dalam proses pertukaran informasi dan penilaian terhadap kandidat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah memiliki akses informasi yang lebih luas melalui media digital dan aktivitas sosial sehari-hari, sehingga memungkinkan mereka melakukan evaluasi politik secara lebih kritis. Dengan karakteristik tersebut, kelas menengah di Kota Gorontalo memainkan peran strategis dalam dinamika Pilkada karena tidak hanya berpartisipasi secara aktif, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kualitas demokrasi lokal.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Kelas Menengah, Pilkada, Pilihan Rasional, Kota Gorontalo

1. Latar Belakang

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) (Dewi et al., 2022). Pada hal ini Partisipasi politik mencerminkan peran aktif masyarakat dalam demokrasi, tidak hanya melalui pemilu tetapi juga dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Ini menunjukkan tanggung jawab bersama untuk memastikan pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. Partisipasi sering kali dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang melibatkan pembangunan, pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, serta pelayanan publik oleh pemerintah. Partisipasi memiliki peran penting dalam proses pembangunan (Kaehe et al., 2019).

Pemilihan kepala daerah di Indonesia menjadi momen krusial yang menentukan arah pembangunan di suatu daerah. Berbagai faktor yang memengaruhi preferensi politik masyarakat umumnya berkaitan dengan status sosial ekonomi kandidat, seperti tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi setempat. Faktor-faktor tersebut membentuk pandangan masyarakat terhadap kemampuan calon pemimpin, khususnya dalam mengelola dan memajukan sektor ekonomi daerah. (Amri et al., 2024) Pada hal ini Status sosial ekonomi calon pemimpin berpengaruh besar terhadap pilihan politik masyarakat. Mereka menilai kemampuan kandidat dari latar belakang pendidikan dan ekonomi yang mencerminkan kapasitas memajukan daerah. Pilihan politik pun lebih didasari pertimbangan rasional daripada faktor emosional atau kedekatan sosial.

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Indonesia, merupakan produk era reformasi yang menimbulkan banyak berbagai fenomena baru Kondisi tersebut membuat dibutuhkan strategi komunikasi politik dimana tidak hanya terbatas pada kegiatan pemasaran politik, namun juga tentang pertukaran pesan yang berkelanjutan dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan di dalam pemerintahan local (Triwicaksono & Nugroho,

2021). pada hal ini Pilkada bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga ruang interaksi antara kandidat dan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi politik menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya untuk menarik dukungan saat kampanye, tetapi juga untuk membangun hubungan dan dialog berkelanjutan antara pemerintah dan warga. Dengan strategi komunikasi yang baik, proses pemerintahan di tingkat lokal dapat lebih partisipatif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. kepala daerah (Walikota/Bupati) memiliki dasar hukum yang bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusannya sendiri, kecuali untuk beberapa urusan yang telah ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat (Boemiya, 2020).

Salah satu pemilihan yang penting bagi mereka adalah Pilkada, Pilkada suatu perwujudan kedaulatan rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam dan turut ikut campur pengambilan kebijakan di suatu daerah tertentu, rakyat memilih siapa saja pemimpin yang berhak duduk di atas kursi sebagai perwakilannya agar hak-haknya dapat terealisasi dengan baik dan benar (Sidqi, 2020). Pada hal ini, pilkada penting karena memberi ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan di daerahnya. Pemimpin yang terpilih diharapkan bisa mewujudkan hak-hak rakyat secara adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, penting juga memastikan proses Pilkada berlangsung transparan dan adil agar suara rakyat benar-benar tercermin dalam hasil pemilihan.

Keterlibatan masyarakat kelas menengah di Kota Gorontalo menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti rendahnya kesadaran politik, minimnya partisipasi aktif, terbatasnya akses terhadap pendidikan politik dan informasi, serta adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang memengaruhi tingkat keikutsertaan mereka dalam politik dan pemerintahan. Meskipun demikian, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kelas menengah di wilayah ini. Salah satu peluang tersebut adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang mempermudah akses masyarakat terhadap informasi terkait politik dan pemerintahan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi masyarakat, seperti pelaksanaan program berbasis partisipasi dan penyelenggaraan forum dialog, juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses politik dan pemerintahan. Partisipasi aktif masyarakat kelas menengah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan kota yang lebih baik, melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang inklusif, perjuangan untuk kepentingan bersama, serta pengawasan terhadap aktivitas pemerintah. Kelas menengah memainkan peran signifikan dalam mendorong pembangunan sebuah kemajuan. Kelompok ini juga memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang yang mendukung kemajuan nasional. Oleh karena itu, banyak yang berupaya mempercepat pertumbuhan kelas menengah melalui berbagai kebijakan dan program. Jumlah populasi kelas menengah dalam suatu daerah sering dijadikan tempat untuk mengukur tingkat kemajuan kelompok tersebut. (Hussein et al., 2021).

Pemilihan walikota tidak dapat berjalan dengan baik tanpa keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Namun, hasil pemilihan terkadang menimbulkan rasa kecewa di kalangan masyarakat. Kekecewaan ini sering disampaikan kepada berbagai pihak, dan rasa ketidakpuasan terhadap pemimpin yang terpilih turut mendorong sebagian masyarakat untuk tidak ikut serta dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) berikutnya. Sikap ini seringkali ditunjukkan secara terang-terangan, dengan cara mengajak orang lain untuk tidak berpartisipasi dalam pilkada. Masyarakat yang memilih untuk tidak ikut serta dalam pilkada dikenal dengan istilah "golput."

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Gorontalo tahun 2024, terdapat empat pasangan calon (paslon) yang akan bertarung memperebutkan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Idris Rahim dan Andi Ilham, yang dikenal dengan akronim pasangan IDAMAN. Pasangan calon nomor urut 2 adalah Ramli Anwar dan Ana Supriyana Abdul Hamid, yang dikenal dengan nama pasangan RAMAH, Pasangan calon nomor urut 3 adalah Adhan Dambea dan Indra Gobel, yang disingkat pasangan AIR, Sementara itu, pasangan calon nomor urut 4 adalah Ryan Kono dan Charles Budi Duko.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada ini dengan total sebanyak 146.070 pemilih, yang terdiri dari 71.198 pemilih laki-laki dan 74.872 pemilih perempuan. DPT tersebar di 9 kecamatan, 50 kelurahan, dan dilayani oleh 276 tempat pemungutan suara (TPS). Ketua KPU Kota Gorontalo menjelaskan secara rinci jumlah pemilih di masing-masing kecamatan: Dumbo Raya sebanyak 13.711 pemilih, Dungingi 18.909 pemilih, Hulonthalangi 12.492 pemilih, Kota Barat 17.839 pemilih, Kota Selatan 14.864 pemilih, Kota Tengah 19.555 pemilih, Kota Timur 19.498 pemilih, Kota Utara 15.185 pemilih, dan Sipatana 14.017 pemilih. Salah satu kelurahan yang menjadi tempat penelitian saya yaitu kelurahan Padebuolo, dengan total pemilih sebanyak 3.455 orang yang tersebar di 6 TPS. Dari jumlah tersebut, 1.695 adalah pemilih laki-laki dan 1.760 adalah pemilih perempuan. Data ini menunjukkan komitmen KPU dalam memastikan seluruh masyarakat Kota Gorontalo dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Di Kelurahan

Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kabupaten Gorontalo, masyarakat kelas menengah memiliki peran yang cukup penting dalam penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan observasi awal, sejumlah individu dari kelompok kelas menengah dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan terkait pilkada. Mereka terlibat dalam menghadiri kampanye politik serta mengikuti debat calon kandidat.

Penelitian ini memiliki keunikan karena berfokus pada partisipasi kelas menengah dalam konteks politik lokal di Kota Gorontalo, yang selama ini jarang menjadi perhatian utama dalam studi-studi politik daerah. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti partisipasi masyarakat secara umum atau kelompok pemilih muda, sementara penelitian ini secara spesifik menempatkan kelas menengah sebagai aktor penting dalam dinamika demokrasi lokal. Keunikan lainnya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kelurahan Padebuolo, yang memberikan gambaran empiris tentang perilaku politik kelas menengah berdasarkan latar sosial, ekonomi, dan pendidikan mereka. Ketertarikan penelitian ini muncul dari realitas sosial bahwa kelas menengah di Gorontalo menunjukkan pola partisipasi yang berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Mereka tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga turut berperan dalam pembentukan opini publik dan pengawasan terhadap jalannya proses demokrasi. Dengan mengkaji partisipasi kelas menengah melalui perspektif teori pilihan rasional James S. Coleman, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana kalkulasi rasional, kepentingan pribadi, serta nilai sosial membentuk keputusan politik mereka. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya wacana akademik tentang perilaku politik kelas menengah di tingkat lokal sekaligus menjadi masukan praktis bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Tidak semua masyarakat kelas menengah di Kelurahan Padebuolo memiliki tingkat partisipasi politik yang sama. Sebagian memilih untuk tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas politik karena berbagai alasan, seperti kesibukan pekerjaan yang menyita waktu, urusan pribadi yang lebih diutamakan, hingga kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas kegiatan politik. Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa suara individu tidak akan membawa perubahan berarti, sehingga memunculkan sikap apatis terhadap pemilihan umum. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih jauh karena menggambarkan dinamika sosial dan politik di kalangan kelas menengah yang kerap dipersepsikan sebagai kelompok rasional dan kritis. Berdasarkan latar tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk serta tingkat partisipasi politik masyarakat kelas menengah di Kelurahan Padebuolo, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam proses politik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji secara mendalam motivasi, hambatan, serta pandangan masyarakat kelas menengah terhadap partisipasi politik, sekaligus menelusuri peran faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam membentuk pola partisipasi mereka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Farida Juliani, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan pertimbangan lokasi mudah diakses serta belum pernah dijadikan objek penelitian serupa.

Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dan observasi langsung dengan masyarakat kelas menengah yang menjadi pemilih tetap di Kelurahan Padebuolo, serta sumber sekunder berupa dokumen, jurnal, laporan, dan data dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Nyangfah Nisa Septiana¹, Zulfatul Khoiriyah², 2024). Informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria (Lenaini, 2021). masyarakat kelas menengah yang memiliki pendidikan tingkat menengah, sudah memiliki pekerjaan tetap, serta berpenghasilan setara UMR. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga mampu memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti (Rijali, 2018).

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Profil Kelas Menengah Dalam Pilkada Walikota

Profil kelas menengah menjadi salah satu hal penting untuk melihat bagaimana partisipasi politik berjalan dalam Pilkada Walikota. Kelompok ini tidak hanya bisa dipahami dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan cara berpikir yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam politik lokal. Kelas menengah sering dipandang sebagai kelompok strategis karena memiliki akses terhadap sumber daya, informasi, dan kemampuan berpikir rasional dalam menentukan pilihan politik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai

profil kelas menengah penting dilakukan untuk memahami bagaimana latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi mereka dapat membentuk orientasi politik dalam Pilkada.

Jika dilihat dari sisi pendidikan, kelas menengah di Kelurahan Padebuolo punya capaian yang relatif lebih baik dibanding kelompok masyarakat lainnya. Mayoritas penduduk sudah menamatkan pendidikan dasar sampai menengah, dengan jumlah lulusan SMA sederajat yang cukup tinggi, yaitu 389 laki-laki dan 403 perempuan. Selain itu, ada juga 72 laki-laki dan 121 perempuan yang berhasil menamatkan kuliah di jenjang sarjana (S1), bahkan sebagian kecil sudah sampai magister (S2). Memang jumlah lulusan perguruan tinggi ini belum terlalu besar dibanding total penduduk, tapi tetap penting karena menunjukkan adanya kelompok yang punya akses pengetahuan dan kapasitas intelektual yang lebih baik.

Kelompok dengan pendidikan lebih tinggi inilah yang biasanya masuk kategori kelas menengah, karena bekal pendidikan membuat mereka bisa berpikir lebih kritis, rasional, dan aktif dalam diskusi sosial maupun politik. Mereka juga cenderung lebih terbuka dalam menyikapi isu-isu masyarakat, baik lewat forum langsung maupun lewat media sosial. Jadi, pendidikan bisa dibilang jadi salah satu faktor utama yang membentuk profil kelas menengah di Kelurahan Padebuolo. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, semakin besar peluang mereka untuk paham isu politik dengan lebih rasional, bisa menyaring informasi secara kritis, dan menentukan pilihan politik dengan lebih terarah. Hal ini sesuai dengan pandangan umum bahwa kelas menengah umumnya punya literasi politik yang lebih baik dibanding kelompok dengan pendidikan rendah.

Selain pendidikan, faktor ekonomi juga jadi penentu penting dalam melihat profil kelas menengah di Kelurahan Padebuolo. Dari data pekerja, terlihat kalau sebagian masyarakat menempati pekerjaan yang bisa digolongkan kelas menengah, seperti PNS, tenaga honorer, karyawan swasta maupun pemerintah, sampai pelaku usaha kecil dan menengah seperti pemilik warung atau rumah makan. Pekerjaan-pekerjaan ini umumnya punya penghasilan tetap atau cukup stabil sehingga bisa menopang kebutuhan keluarga. Kalau dirinci, karyawan swasta laki-laki ada 74 orang dan perempuan 23 orang. PNS relatif seimbang, 28 laki-laki dan 26 perempuan, ditambah 28 laki-laki serta 23 perempuan yang bekerja sebagai tenaga honorer. Di bidang usaha, justru perempuan lebih dominan dengan 47 orang pemilik warung/rumah makan dibanding 13 laki-laki. Data ini nunjukkin kalau sumber penghasilan kelas menengah cukup beragam dengan distribusi gender yang berbeda di tiap jenis pekerjaan.

Kondisi ekonomi yang stabil bikin kelas menengah lebih mandiri dalam menentukan pilihan politik, karena mereka tidak terlalu bergantung pada bantuan atau program jangka pendek dari kandidat tertentu. Dengan penghasilan yang lebih terjamin, kelompok ini juga cenderung lebih kritis dalam menilai program dan visi misi calon kepala daerah, berbeda dengan kelas bawah yang sering lebih pragmatis. Jadi, bisa dibilang faktor ekonomi ikut memperkuat rasionalitas kelas menengah dalam proses Pilkada.

Dari sisi sosial, kelas menengah di Kelurahan Padebuolo punya lingkup pergaulan yang lebih luas dan beragam karena ditopang oleh pendidikan dan ekonomi mereka. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi, terutama lulusan SMA sampai sarjana (S1), bikin mereka bisa berinteraksi di lingkungan yang lebih heterogen. Mereka tidak hanya bergaul dengan keluarga atau tetangga, tapi juga aktif di organisasi keagamaan, forum diskusi, maupun kelompok profesional sesuai pekerjaan. Pola pergaulan ini membuat cara komunikasi mereka lebih terbuka dan rasional dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik. Dari sisi ekonomi, penghasilan yang stabil dari pekerjaan formal seperti PNS, karyawan swasta, atau pelaku usaha menengah memberi mereka peluang lebih besar untuk ikut berbagai aktivitas sosial. Daya beli yang lebih baik juga memudahkan akses pada teknologi komunikasi seperti smartphone dan internet, sehingga lingkup pergaulan makin luas lewat media sosial atau forum online. Kombinasi pendidikan dan ekonomi ini bikin kelas menengah cenderung lebih kritis, selektif dalam menerima informasi politik, serta sering jadi rujukan bagi orang di sekitarnya dalam menentukan pilihan. Artinya, lingkup sosial mereka tidak hanya memperkuat posisi di masyarakat, tapi juga menegaskan peran strategis dalam membentuk rasionalitas politik di tingkat lokal.

Dalam upaya memahami dinamika pemilih di Kelurahan Padebuolo, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperoleh pandangan terkait proses klasifikasi pemilih yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Wawancara ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPU memandang keberagaman latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan proses pemilihan. Adapun penjelasan dari pihak KPU dapat dilihat pada kutipan hasil wawancara berikut:

"kami di KPU tidak mengklasifikasi pemilih berdasarkan kelas menengah atau kelompok ekonomi tertentu yang ada hanya DPT. klasifikasi yang kami gunakan sepenuhnya bersifat administratif dan berkaitan dengan hak pilih bukan berkaitan dengan status sosial dan ekonomi, silahkan di klasifikasikan berdasarkan konsep/teori ilmu saudara yang bisa mengelompokkan kelas-kelas atau kelompok sosial masyarakat"

(Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Wawancara dengan bapak ketua KPU, 19 mei 2025/09.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat dipahami bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak melakukan klasifikasi pemilih berdasarkan status sosial ekonomi, termasuk kategori kelas menengah. Klasifikasi yang digunakan oleh KPU bersifat administratif dan hanya berkaitan dengan pemenuhan hak pilih warga negara yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Artinya, KPU tidak memisahkan atau mengelompokkan pemilih berdasarkan faktor ekonomi, pekerjaan, maupun tingkat pendidikan, melainkan berfokus pada aspek legalitas dan keabsahan data pemilih. Dengan demikian, pengelompokan masyarakat ke dalam kategori kelas sosial atau kelas ekonomi, seperti kelas menengah, sepenuhnya menjadi ranah analisis ilmiah yang dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan konsep atau teori sosiologi yang relevan.

3.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Pemilih Menengah

Partisipasi politik kelas menengah dalam Pilkada Walikota Gorontalo di Kelurahan Padebuolo menunjukkan adanya kesadaran dan sikap rasional dalam berpolitik. Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan mereka tidak hanya sebatas memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga tampak melalui berbagai kegiatan non-formal seperti mengikuti debat calon, menghadiri kampanye, serta aktif berdiskusi di media sosial mengenai isu-isu politik dan kebijakan publik. Bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap proses politik dan lebih selektif dalam menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap visi, misi, dan program kerja kandidat.

Masyarakat kelas menengah di Kelurahan Padebuolo memandang partisipasi politik sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus sarana untuk menyalurkan aspirasi terhadap pembangunan daerah. Dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang lebih baik, mereka cenderung bersikap kritis serta berpikir rasional dalam menyikapi setiap dinamika politik yang terjadi. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan membahas dua indikator utama bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat kelas menengah, yaitu partisipasi dalam melihat debat calon walikota dan partisipasi dalam menghadiri kampanye, yang mencerminkan bagaimana kesadaran politik mereka diwujudkan dalam tindakan nyata selama proses Pilkada berlangsung.

1. Partisipasi dalam Melihat Debat

Debat calon kepala daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses Pilkada yang bertujuan untuk memperkenalkan visi, misi, serta program kerja para kandidat secara terbuka kepada masyarakat. Melalui debat, pemilih dapat menilai kapasitas, integritas, dan kemampuan komunikasi calon pemimpin yang akan mereka pilih. Bagi kalangan kelas menengah, partisipasi dalam menyaksikan debat menjadi salah satu bentuk keterlibatan politik yang bersifat non-formal namun bermakna. Keterlibatan ini tidak selalu ditunjukkan melalui kehadiran langsung di lokasi debat, melainkan juga melalui siaran televisi, media sosial, atau kanal daring lainnya. Dalam konteks Pilkada di Kelurahan Padebuolo, partisipasi masyarakat kelas menengah dalam melihat debat calon walikota mencerminkan upaya mereka untuk mengambil keputusan secara lebih rasional dan berdasarkan informasi yang objektif. Untuk memahami lebih dalam bagaimana bentuk partisipasi ini dijalankan oleh pemilih kelas menengah, peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang mengikuti atau memberikan perhatian terhadap debat kandidat.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana bentuk partisipasi kelas menengah dalam menyimak debat calon kepala daerah, peneliti mewawancarai Ibu Yuliana sebagai berikut.

“saya menonton semua sesi debat calon walikota. Sebagai pendidik, saya merasa penting untuk mengetahui komitmen para calon terhadap sektor pendidikan, terutama soal kesejahteraan guru. Debat itu sangat membantu saya memahami visi dan misi mereka secara lebih jelas. Dari situ, saya bisa melihat seberapa serius mereka membahas peningkatan fasilitas pendidikan dasar dan pelatihan guru. Debat juga cukup berpengaruh terhadap pilihan saya. Saya condong memilih calon yang menyampaikan gagasan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat, terutama dalam mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk menontonnya, saya menggunakan televisi nasional dan streaming resmi. Kadang saya juga lihat highlight-nya di YouTube KPU.”(wawancara ibu yuliana, 17 mei 2025)”

(Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Wawancara dengan Ibu Yuliana, Sabtu, 17 Mei 2025/20.30 WITA).

Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana menunjukkan bahwa ia menonton semua sesi debat calon walikota. Sebagai seorang pendidik, ia merasa penting untuk mengetahui sejauh mana komitmen para calon terhadap sektor pendidikan, khususnya mengenai kesejahteraan guru. Ia menyatakan bahwa debat sangat membantunya memahami visi dan misi para kandidat secara lebih jelas, terutama saat membahas peningkatan fasilitas pendidikan dan pelatihan guru. Debat tersebut juga memengaruhi pilihannya, di mana ia lebih condong kepada calon yang menawarkan program kolaborasi antara sekolah dan masyarakat, terutama dalam mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk menyaksikan debat, ia menggunakan televisi nasional, layanan streaming resmi, dan sesekali menonton cuplikan melalui YouTube KPU.

Partisipasi Ibu Yuliana dalam menyaksikan debat calon walikota mencerminkan perilaku pemilih kelas menengah yang rasional dan berbasis informasi. Ia secara sadar memilih untuk menonton seluruh sesi debat sebagai bagian dari upaya memahami program kerja dan komitmen para calon, khususnya terkait isu pendidikan yang menjadi perhatiannya sebagai seorang pendidik. Sikap ini menunjukkan bahwa pilihannya dalam Pilkada tidak didasarkan pada kedekatan emosional atau tekanan sosial, melainkan pada penilaian terhadap substansi visi dan misi kandidat. Jika dianalisis menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman, tindakan Ibu Yuliana dapat dikategorikan sebagai bentuk keputusan yang rasional dan berorientasi pada tujuan. Dalam kerangka teori ini, individu dianggap sebagai aktor sosial yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi terhadap suatu tindakan. Ibu Yuliana menonton debat karena menyadari bahwa informasi yang ia peroleh akan membantunya menentukan pilihan politik yang paling sesuai dengan nilai dan kepentingannya, terutama terkait dengan sektor pendidikan dan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus. Pilihan politik yang ia ambil setelah menyaksikan debat juga menunjukkan bahwa ia menghubungkan keputusan individunya dengan dampak sosial yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan konsep Coleman mengenai aktor yang menggunakan sumber daya (dalam hal ini hak pilih dan informasi) untuk mencapai hasil yang dianggap bermanfaat, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi komunitas. Dengan demikian, partisipasi Ibu Yuliana dalam melihat debat merupakan bentuk keterlibatan politik yang rasional, reflektif, dan bertanggung jawab.

Setelah memperoleh pandangan dari Ibu Yuliana, peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Riska, sebagai berikut.

“Saya hanya menonton satu sesi debat calon walikota, tepatnya saat membahas infrastruktur kota. Karena saya bekerja di bidang konstruksi, topik tersebut sangat relevan dan menarik bagi saya. Debat itu cukup membantu, terutama saat salah satu calon memaparkan rancangan anggaran dan tahapan pembangunan jalan secara rinci—itu jauh lebih meyakinkan dibanding calon lain yang hanya berbicara secara umum. Debat tersebut juga memengaruhi pilihan saya; saya akhirnya memilih calon yang menekankan pentingnya transparansi anggaran dan kerja sama dengan kontraktor lokal. Untuk menontonnya, saya menggunakan TV kabel lokal dan memutar ulang bagian debat melalui media online.”(wawancara ibu riska 17 mei 2025).

Hasil wawancara dengan Ibu Riska menunjukkan bahwa ia hanya menonton satu sesi debat calon walikota, yaitu sesi yang membahas topik infrastruktur kota. Meskipun tidak mengikuti seluruh rangkaian debat, keikutsertaannya pada sesi tersebut didorong oleh alasan yang sangat spesifik dan relevan dengan latar belakang profesinya di bidang konstruksi. Ia merasa bahwa isu infrastruktur adalah hal yang penting dan memiliki dampak langsung terhadap pekerjaannya, sehingga menarik perhatiannya untuk menyimak secara lebih serius.

Menurut Ibu Riska, debat tersebut cukup membantu dalam memahami sejauh mana para calon memiliki pemahaman dan perencanaan yang matang mengenai pembangunan daerah. Ia merasa lebih yakin terhadap salah satu calon yang memaparkan rencana pembangunan jalan secara detail, termasuk rancangan anggaran dan tahapan pelaksanaannya. Bagi Ibu Riska, penyampaian yang konkret dan teknis seperti itu jauh lebih meyakinkan dibandingkan calon lain yang berbicara secara umum tanpa menunjukkan langkah-langkah nyata.

Debat ini pun memengaruhi keputusan politiknya. Ia mengaku memilih calon yang dalam debat tersebut menekankan transparansi anggaran serta keterlibatan kontraktor lokal dalam proses pembangunan. Sikap ini ia nilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap pengusaha lokal dan efisiensi anggaran publik. Dalam mengakses debat, Ibu Riska menggunakan televisi kabel lokal dan juga memutar ulang bagian-bagian tertentu melalui media online, menunjukkan bahwa meskipun tidak menonton secara langsung secara penuh, ia tetap berusaha mendapatkan informasi yang relevan dengan caranya sendiri. Partisipasi ini menggambarkan karakter pemilih kelas menengah yang selektif, rasional, dan berbasis pada kepentingan yang nyata dan terukur.

Partisipasi Ibu Riska dalam menyimak debat calon walikota memperlihatkan pola keterlibatan politik yang selektif dan berbasis kepentingan rasional. Meskipun tidak mengikuti seluruh sesi debat, ia memilih untuk menonton topik yang secara langsung berkaitan dengan profesinya di bidang konstruksi, yakni infrastruktur kota.

Pilihan ini menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam debat tidak bersifat emosional atau simbolik, melainkan didorong oleh relevansi isu terhadap kondisi riil yang ia hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditinjau melalui teori pilihan rasional James S. Coleman, tindakan Ibu Riska mencerminkan prinsip utama teori tersebut, yaitu bahwa individu bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan kalkulasi manfaat. Dalam hal ini, Ibu Riska memilih untuk menonton debat yang membahas infrastruktur karena topik itu memberikan informasi yang berguna bagi dirinya sebagai pelaku di sektor konstruksi. Ia mengevaluasi kandidat berdasarkan seberapa rinci dan realistis mereka memaparkan rencana pembangunan, termasuk aspek anggaran dan kerja sama dengan kontraktor lokal. Pilihan politiknya pun didasarkan pada hasil evaluasi tersebut. Ia memutuskan memilih calon yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi anggaran dan pemberdayaan pelaku lokal. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya menggunakan hak pilih secara formal, tetapi juga secara rasional dan terinformasi. Dalam pandangan Coleman, tindakan seperti ini menggambarkan aktor sosial yang memanfaatkan informasi sebagai sumber daya untuk mencapai hasil yang dianggap paling menguntungkan—baik secara pribadi maupun sosial. Dengan demikian, partisipasi Ibu Riska menggambarkan bentuk keterlibatan politik kelas menengah yang rasional, pragmatis, dan berbasis pada pertimbangan kepentingan yang konkret. Ia menjadi contoh pemilih yang tidak pasif, tetapi juga tidak mengikuti seluruh proses secara luas; ia memilih untuk terlibat dalam bagian yang paling relevan dan penting baginya. Dalam perspektif Coleman, Ibu Riska bertindak sebagai aktor rasional yang menggunakan sumber daya informasi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memastikan bahwa calon yang dipilih memiliki komitmen terhadap transparansi anggaran dan pemberdayaan pelaku lokal. Ia tidak hanya menonton debat sebagai bentuk partisipasi pasif, tetapi mengolah informasi tersebut sebagai dasar untuk memaksimalkan kepentingannya sebagai pelaku di bidang konstruksi (Syafira & Harianto, 2020).

2. Partisipasi dalam Menghadiri dalam kampanye

Kampanye politik merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pemilihan kepala daerah. Melalui kampanye, para calon berupaya menyampaikan visi, misi, serta program kerja secara langsung kepada masyarakat pemilih. Bagi pemilih kelas menengah, partisipasi dalam menghadiri kampanye tidak hanya dipahami sebagai kehadiran fisik semata, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan dalam proses demokrasi secara lebih aktif. Keterlibatan ini dapat mencerminkan minat, kesadaran politik, serta keinginan untuk menilai langsung kualitas calon sebelum menentukan pilihan. Di Kelurahan Padebuolo, keikutsertaan pemilih kelas menengah dalam menghadiri kampanye menunjukkan dinamika tersendiri yang menarik untuk ditelusuri. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan guna memahami bentuk dan motivasi partisipasi mereka dalam kegiatan kampanye selama Pilkada berlangsung.

Untuk menggambarkan lebih lanjut bagaimana bentuk partisipasi kelas menengah dalam menghadiri kampanye politik, peneliti mewawancarai Ibu Ebi sebagai berikut.

“Ya, saya pernah menghadiri kampanye terbuka sebanyak dua kali dari salah satu calon walikota. Motivasi saya datang karena ingin mendengar langsung visi dan program kerja kandidat, bukan hanya dari baliho atau media sosial. Selama kampanye, saya mendengarkan orasi politik, mengambil brosur program, dan juga sempat berdiskusi dengan tim sukses yang ada di lokasi. Menurut saya, bertemu langsung dengan calon membuat saya lebih objektif dalam menilai, karena saya bisa melihat langsung cara mereka berkomunikasi dan menjawab isu-isu yang disampaikan masyarakat. Kampanye itu sangat memengaruhi pilihan saya. Setelah hadir langsung, saya jadi lebih yakin terhadap integritas dan gaya kepemimpinan calon tersebut.”(wawancara ibu ebi 18 mei 2025).

Hasil wawancara dengan Ibu Ebi menunjukkan bahwa ia menghadiri kampanye terbuka sebanyak dua kali yang diselenggarakan oleh salah satu calon walikota. Keikutsertaannya dalam kampanye bukan semata-mata karena ajakan, tetapi didorong oleh keinginan pribadi untuk mendengar langsung visi, misi, dan program kerja calon tersebut. Ia merasa bahwa informasi yang disampaikan secara langsung dalam kampanye lebih dapat dipercaya dan memberikan gambaran utuh, dibandingkan hanya mengandalkan baliho, brosur, atau media sosial yang menurutnya sering kali bersifat sepihak dan tidak mendalam.

Selama menghadiri kampanye, Ibu Ebi mengikuti orasi politik yang disampaikan oleh calon, membaca materi program kerja yang dibagikan dalam bentuk brosur, serta berdiskusi langsung dengan beberapa anggota tim sukses di lokasi. Interaksi ini memberinya kesempatan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan mengonfirmasi langsung komitmen calon terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Ia merasa bahwa dengan bertemu langsung, ia bisa menilai kepribadian, gaya komunikasi, dan cara calon merespons pertanyaan atau kritik dari warga secara lebih objektif.

Ibu Ebi juga menyampaikan bahwa pengalamannya mengikuti kampanye sangat berpengaruh terhadap pilihannya. Setelah menghadiri kegiatan tersebut, ia merasa lebih yakin terhadap integritas dan kepemimpinan calon yang bersangkutan. Keputusan politiknya menjadi lebih mantap karena didasarkan pada penilaian langsung, bukan hanya kesan dari media. Ini menunjukkan bahwa partisipasinya dalam kampanye merupakan bentuk keterlibatan politik yang aktif dan berorientasi pada pemahaman substansial terhadap calon yang akan dipilih.

Partisipasi Ibu Ebi dalam menghadiri kampanye terbuka menunjukkan bentuk keterlibatan politik yang bersifat aktif dan terencana. Ia memilih untuk hadir langsung dalam dua kali kampanye bukan karena dorongan emosional atau sekadar mengikuti keramaian, melainkan karena adanya niat untuk memperoleh informasi yang lebih objektif dan menyeluruh tentang calon walikota. Bagi Ibu Ebi, kampanye adalah kesempatan untuk menilai langsung gaya komunikasi, penyampaian visi-misi, serta respons calon terhadap aspirasi masyarakat. Keputusan tersebut menandakan adanya proses pertimbangan rasional sebelum menentukan pilihan politik. Jika dianalisis melalui teori pilihan rasional James S. Coleman, tindakan Ibu Ebi mencerminkan perilaku individu yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi manfaat. Dalam hal ini menjelaskan bahwa Coleman, tindakan Ibu Ebi menunjukkan bahwa ia bertindak sebagai aktor rasional yang memanfaatkan sumber daya (informasi politik langsung dari calon) untuk mengoptimalkan hasil pilihannya. Keputusannya menghadiri kampanye merupakan bentuk intervensi mikro yang berkontribusi pada sistem sosial politik lokal. Ketika banyak individu seperti Ibu Ebi melakukan tindakan serupa, terbentuklah pola partisipasi politik yang lebih kritis dan aktif di tingkat masyarakat (makro), sebagaimana dijelaskan Coleman bahwa sistem sosial merupakan hasil akumulasi tindakan individu (Amelia, I. S., & Fauzi, 2021). Dalam konteks ini, keputusannya untuk menghadiri kampanye dilandasi oleh pertimbangan bahwa informasi yang ia dapatkan secara langsung dari calon lebih bernilai dan dapat dijadikan dasar dalam memilih secara tepat. Ia tidak pasif terhadap informasi politik, tetapi secara aktif mencari sumber informasi langsung yang dinilainya lebih kredibel dibandingkan media atau baliho. Dalam kerangka teori Coleman, Ibu Ebi bertindak sebagai aktor sosial yang menggunakan hak pilih sebagai bentuk investasi terhadap masa depan kepemimpinan di daerahnya. Ia memperhitungkan bahwa kehadirannya di kampanye akan memberikan pemahaman lebih mendalam dan berdampak pada akurasi pilihannya. Dengan kata lain, ia menjalankan partisipasi politik secara sadar, penuh pertimbangan, dan diarahkan untuk mencapai hasil terbaik—baik bagi dirinya maupun masyarakat sekitar. Dengan demikian, partisipasi Ibu Ebi mencerminkan karakter pemilih kelas menengah yang rasional dan aktif, yang tidak hanya memilih berdasarkan simbol atau citra, tetapi berdasarkan penilaian personal atas integritas dan kualitas komunikasi politik dari para calon.

Setelah memperoleh gambaran dari Ibu Ebi mengenai bentuk partisipasinya dalam menghadiri kampanye, peneliti kemudian mewawancarai Bapak Isal sebagai berikut.

“Saya tidak pernah menghadiri kampanye calon walikota secara langsung. Sebagai seorang paralegal yang sering bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan partai politik, saya merasa penting untuk menjaga profesionalisme dan tetap netral dalam pekerjaan saya. Selama masa kampanye, saya tidak mengikuti kegiatan lapangan apa pun, tapi saya tetap memantau perkembangan melalui media sosial dan berita online. Pilihan politik saya lebih dipengaruhi oleh debat publik dan artikel investigasi yang mengulas rekam jejak para kandidat. Bagi saya, menjaga jarak dari kegiatan kampanye adalah cara terbaik untuk tetap obyektif dan mengambil keputusan politik secara independen tanpa benturan kepentingan.”(wawancara pak isal 18 mei 2025).

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa Bapak Isal tidak pernah menghadiri kampanye calon walikota secara langsung. Ia memiliki alasan yang kuat dan bersifat profesional. Sebagai seorang paralegal yang sering bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan partai politik, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme dan bersikap netral dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, keterlibatan langsung dalam kampanye politik dapat menimbulkan kesan keberpihakan yang berpotensi mengganggu integritas pekerjaan yang ia jalani. Meskipun tidak hadir secara fisik di kegiatan kampanye, Bapak Isal tetap menunjukkan ketertarikan terhadap dinamika politik selama Pilkada dengan memantau jalannya kampanye melalui media sosial dan berita daring. Ia memilih untuk memperoleh informasi politik dari sumber-sumber digital yang menurutnya lebih fleksibel dan tidak mengganggu posisinya secara profesional.

Pilihan politik yang ia ambil juga tidak bersumber dari pengaruh kampanye langsung, melainkan lebih dipengaruhi oleh tayangan debat publik antar calon dan artikel investigasi yang menampilkan rekam jejak masing-masing kandidat. Bagi Bapak Isal, informasi semacam itu lebih objektif dan relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terlibat secara langsung dalam kampanye, ia tetap menjadi pemilih aktif yang rasional dan terinformasi. Sikapnya mencerminkan kehati-

hatian khas kalangan kelas menengah yang menjunjung etika profesional sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab politiknya sebagai warga negara.

Partisipasi politik Bapak Isal menunjukkan karakter pemilih kelas menengah yang berhati-hati, rasional, dan selektif dalam menempatkan diri dalam proses politik, khususnya pada momentum kampanye. Ketidakhadirannya dalam kampanye bukan disebabkan oleh sikap apatis, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan netralitas karena posisinya sebagai seorang paralegal yang sering bekerja sama dengan instansi pemerintah dan partai politik. Ia secara sadar memilih untuk tidak terlibat secara fisik dalam kampanye demi menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas profesinya. Meskipun tidak terlibat secara langsung, Bapak Isal tetap mengikuti perkembangan politik melalui media sosial, berita daring, tayangan debat publik, serta artikel investigasi yang mengulas rekam jejak para kandidat. Cara ini menunjukkan bahwa ia tetap aktif sebagai pemilih dan menjalankan peran politiknya secara rasional dan bertanggung jawab, meskipun tidak hadir di lapangan.

Jika dianalisis menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman, tindakan Bapak Isal mencerminkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan untung-rugi serta nilai yang ingin dipertahankan. Dalam kerangka ini, individu dianggap bertindak untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Bagi Bapak Isal, manfaat dari menjaga profesionalitas dan netralitas lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari menghadiri kampanye secara langsung. Namun demikian, ia tetap mengakses informasi politik melalui media lain untuk membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan data. Tindakan Bapak Isal menunjukkan bahwa rasionalitas tidak selalu berarti keterlibatan secara langsung, tetapi juga bisa tercermin melalui sikap selektif dalam memilih cara berpartisipasi yang sesuai dengan posisi sosial dan tanggung jawab profesionalnya. Hal ini juga mencerminkan bahwa dalam konteks pemilih kelas menengah, partisipasi politik dapat bersifat simbolik dan substantif sekaligus, asalkan dilakukan dengan kesadaran dan pertimbangan yang matang. selanjutnya Keterkaitan teori pilihan rasional James S. Coleman yang dikutip (Pujileksono & Siregar, 2022). jika dikaitkan dengan perilaku Bapak Isal merupakan contoh konkret intervensi sosial pada level mikro yang berkontribusi terhadap terbentuknya sistem sosial politik (makro) yang lebih kritis dan partisipatif. Ia berperan sebagai aktor rasional yang secara sadar memutuskan untuk menggunakan hak politiknya berdasarkan informasi dan keyakinan pribadi. Melalui tindakan-tindakan mikro seperti mengikuti debat kandidat, memberikan opini di media sosial, dan mendorong diskusi politik di lingkungannya, tercipta efek sosial yang lebih luas berupa meningkatnya kesadaran politik di kalangan kelas menengah Padebuolo.

Setelah memperoleh gambaran dari bapak isal mengenai bentuk partisipasinya dalam menghadiri kampanye, peneliti kemudian mewawancarai ibu mirna sebagai berikut.

“Ya, saya pernah menghadiri kampanye terbuka satu kali dari salah satu calon walikota. Alasan saya datang karena ingin mendengar langsung visi dan program calon tanpa perantara media. Selama kampanye, saya mendengarkan orasi politik, mengambil brosur program, dan memperhatikan bagaimana calon berinteraksi dengan warga. Setelah menghadiri kampanye tersebut, saya merasa lebih yakin terhadap calon yang komunikatif dan realistis dalam menjelaskan programnya. Namun, bagi saya yang jarang hadir, alasan utamanya karena kesibukan kerja, jadi saya lebih sering memantau perkembangan kampanye lewat media sosial dan berita online”

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa ibu mirna pernah menghadiri kampanye terbuka sebanyak satu kali dari salah satu calon walikota. Kehadirannya dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendengar langsung visi, misi, dan program kerja calon tanpa bergantung pada informasi dari media sosial atau pemberitaan yang dianggap sering tidak lengkap. Ibu mirna menilai bahwa menghadiri kampanye secara langsung memberikan kesempatan untuk menilai karakter dan kredibilitas calon melalui cara mereka berbicara dan berinteraksi dengan masyarakat. Selama menghadiri kampanye, ibu mirna mengikuti rangkaian kegiatan seperti mendengarkan orasi politik, menerima brosur program kerja, dan mengamati perilaku calon saat berinteraksi dengan warga. Ia menganggap kegiatan tersebut penting untuk melihat sejauh mana calon memahami kebutuhan masyarakat dan mampu menyampaikan gagasan secara jelas. Melalui pengalaman itu, informan merasa lebih yakin terhadap calon yang komunikatif, transparan, serta realistis dalam menjelaskan program kerjanya.

Meskipun demikian, ibu mirna mengakui bahwa kesibukan pekerjaan menjadi alasan utama ia jarang menghadiri kegiatan kampanye secara langsung. Sebagai gantinya, ia lebih sering mengikuti perkembangan politik melalui media sosial dan berita online. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik yang ditunjukkan informan bersifat selektif dan rasional, di mana keterlibatan langsung dilakukan jika dianggap relevan dan bermanfaat, sementara pada kesempatan lain ia tetap berpartisipasi secara tidak langsung melalui akses informasi digital.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi ibu mirna dalam menghadiri kampanye mencerminkan pola keterlibatan politik kelas menengah yang bersifat rasional dan selektif. Keputusan untuk hadir hanya satu kali didasarkan pada pertimbangan pribadi untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif dan akurat mengenai calon walikota. Informan tidak serta-merta mengikuti semua kegiatan kampanye, melainkan memilih momen yang dianggap paling relevan dan bermanfaat bagi dirinya. Hal ini menggambarkan karakter kelas menengah yang cenderung menilai sesuatu secara logis dan mempertimbangkan efisiensi waktu serta manfaat dari setiap tindakan politik yang dilakukan.

Jika dikaitkan dengan teori pilihan rasional James S. Coleman, tindakan ibu mirna dapat dipahami sebagai bentuk keputusan sosial yang dilandasi pertimbangan untung-rugi. Dalam teori ini, individu dianggap sebagai aktor yang memiliki tujuan dan membuat keputusan berdasarkan kalkulasi manfaat yang paling besar bagi dirinya. Dalam konteks ini, ibu mirna menghadiri kampanye karena menilai bahwa memperoleh informasi langsung dari calon memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan hanya mengandalkan sumber sekunder seperti media sosial. Namun, karena kesibukan pekerjaan, ia juga menilai bahwa menghadiri seluruh rangkaian kampanye tidak efisien, sehingga ia tetap berpartisipasi secara tidak langsung dengan mengikuti berita dan diskusi daring. Hal ini sejalan dengan pandangan Coleman bahwa tindakan individu dalam sistem sosial dapat memengaruhi tatanan kolektif. Dengan demikian, partisipasi politik Ibu Mirna mencerminkan tindakan sosial yang rasional, bertujuan, dan dilandasi kesadaran penuh terhadap peran dan pengaruhnya dalam proses demokrasi. selanjutnya Keterkaitan teori pilihan rasional James S. Coleman yang dikutip oleh (Andhita Risiko Faristiana, 2022). dengan hasil penelitian ini terlihat dari cara masyarakat kelas menengah di Kelurahan Padebuolo mengambil keputusan politik secara rasional untuk memaksimalkan kepentingannya. Sejalan dengan pandangan Coleman bahwa manusia adalah agen rasional yang mempertimbangkan keuntungan dan biaya dari setiap tindakannya, kelas menengah dalam penelitian ini menunjukkan perilaku politik yang logis dan kritis mereka menilai visi, misi, serta integritas calon sebelum berpartisipasi dalam Pilkada, bukan karena dorongan emosional, tetapi karena pertimbangan manfaat sosial dan politik yang ingin dicapai.

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa ibu mirna memanfaatkan sumber daya informasi politik yang tersedia untuk membuat keputusan yang tepat tanpa harus terlibat secara berlebihan dalam kegiatan kampanye. Hal ini sesuai dengan pandangan Coleman bahwa setiap individu bertindak dalam kerangka sosial dengan mempertimbangkan posisi, sumber daya, serta konsekuensi dari setiap tindakan. Dengan demikian, partisipasi politik informan dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi rasional, di mana keputusan diambil secara sadar, terukur, dan berorientasi pada tujuan, yaitu memperoleh informasi yang akurat agar dapat menentukan pilihan politik secara tepat dan independen.

4. Kesimpulan

Hasil Penelitian di Kelurahan Padebuolo menunjukan bahwa, Kelas menengah di Kelurahan Padebuolo umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi serta pekerjaan yang stabil seperti PNS, karyawan swasta, dan pelaku usaha kecil menengah. Kondisi tersebut membentuk kemandirian ekonomi, wawasan yang lebih luas, serta kemampuan berpikir rasional dalam menentukan pilihan politik. Partisipasi mereka dalam Pilkada tidak hanya terbatas pada pemberian suara di TPS, tetapi juga mencakup aktivitas politik non-formal seperti menonton debat calon, menghadiri kampanye, serta berdiskusi melalui media sosial. Dengan tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi, mereka cenderung menilai calon berdasarkan program, visi-misi, dan rekam jejak, bukan pada iming-iming atau kedekatan emosional. Forum debat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menilai kompetensi dan integritas kandidat melalui televisi, media daring, maupun siaran ulang, sehingga keputusan politik yang diambil lebih berlandaskan pada informasi yang objektif, sejalan dengan konsep rasionalitas dalam teori pilihan rasional James S. Coleman. Kehadiran mereka dalam kampanye pun bukan karena ajakan atau imbalan, melainkan didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk memastikan kesesuaian visi-misi kandidat dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan bentuk partisipasi politik yang sadar, kritis, dan rasional dalam dinamika Pilkada di tingkat lokal.

5. Referensi

1. Amelia, I. S., & Fauzi, A. M. (2021). pilihan rasional masyarakat lamongan dalam memilih bank syari'ah. *Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 10 (1).
2. Amri, H., Sutanto, H., & Purwadinata, S. (2024). Menelisik Status Sosial Ekonomi Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Membangun Ekspektasi Ekonomi dan Preferensi Politik Masyarakat di Kota Mataram. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1330–1336. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5782>
3. Andhita Risiko Faristiana. (2022). Pilihan Rasional Menjadi Mahasiswa Dan Musyriyah Tahfidz. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 23–36. <https://doi.org/10.55606/jurish.v2i1.617>

4. Boemiya, H. (2020). Kajian Hukum Pembentukan Tenaga Ahli Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Pamator Journal*, 13(1), 18–25. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6999>
5. Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
6. Farida Juliani. (2021). *Pendidikan Pemilih Oleh KPU Kota Mataram Dalam Pelaksanaan Pilkada Dimasa Pandemi Covid-19*. 19.
7. Hussein, U. T., Hulu, T., & Hilir, I. (2021). [EXPLORING THE CONTRIBUTION OF THE MUSLIM MIDDLE CLASS SOCIETY IN MALAYSIA TO THE NATIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT] MENEROKA SUMBANGAN MASYARAKAT KELAS MENENGAH MUSLIM DI MALAYSIA TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI NEGARA PENGENALAN *Kelas menengah me*. 22(3), 211–224.
8. Kaehe, D., Ruru, J. M., & Welson, R. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24.
9. Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
10. Nyangfah Nisa Septiana1, Zulfatul Khoiriyah2, S. (2024). *METODE PENELITIAN STUDI KASUS DALAM PENDEKATAN KUALITATIF*. 10, 239. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.5181>
11. Pujileksono, S., & Siregar, M. (2022). Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.30742/juipol.v2i2.2592>
12. Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali. *Al Hadharah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
13. Sidqi, I. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Pemalang Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19. *Rechtenstudent*, 1(2), 95–109. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.24>
14. Syafira, D., & Harianto, S. (2020). Pilihan Rasional Masyarakat Surabaya Dalam Menggunakan Suroboyo Bus. *E-Journal UNESA*, 9 (1), 1–21.
15. Triwicaksono, Y. D. B. B., & Nugroho, A. (2021). Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(1), 133–145. <https://doi.org/10.51544/jlmc.v5i1.2037>